

## PERAN GIZ JERMAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI KAB. BERAU TAHUN 2009-2014

Erick Ryan Tamba<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study describes the Berau region with a sizeable forest population in the province of East Kalimantan. However, in its development, the forest area in Berau experienced damage caused by several factors, both in forest management and also external factors, with the rampant cases of illegal logging being converted into illegal mining land. Therefore, to anticipate and minimize these cases, various efforts have been made both internally and externally. One of the efforts made was the establishment of a Forest Management Unit (KPH) as a forestry reform step designed in 2007. However, there were several obstacles in the process of implementing this program, namely limited funds, several technical programs suitable for implementation in the field, and lack of knowledge. community towards the forest management system. Therefore, Germany is providing assistance in the form of a cooperation program between Indonesia and Germany which can provide technical and financial assistance to support the implementation of the program. To analyze this research using the theory of Environmentalism by involving the role of external parties, namely Program Socialization, Distribution of Assistance, and Program Implementation implemented by GIZ Germany. Through various approaches and assistance distributed, the results show that FORCLIME's success factor is the socialization of programs and top-down approaches, regarding reducing domestic carbon emissions through environmental preservation accompanied by local community economic development.*

**Keywords:** *Forest, Indonesia, Berau, GIZ, FORCLIME*

### Pendahuluan

Kabupaten Berau menjadi salah satu wilayah dengan populasi hutan terbesar pada lingkup wilayah Kalimantan Timur, Indonesia dengan luas wilayah hutan sebesar 2.194.99,55Ha yang terdiri atas hutan lindung, produksi tetap, produksi terbatas, konservasi dan hutan area penggunaan lain. Selain itu terdapat beberapa usaha industri yang beroperasi didalamnya yaitu pertambangan, pabrik kertas, karet dan industri kelapa sawit. Namun, berdasarkan data Dinas Kehutanan 2008 mencatat bahwa terdapatsekitar 150.447Ha lahan hutan mengalami disfungsi lahan secara ilegal dengan berdirinya beberapa industri salah satunya adalah tambang. Terdapat sekitar 18 perusahaan tambang yang beroperasi secara ilegal di Kab. Berau. Beberapa perusahaan tersebut yaitu PT. Anugerah Bara Kaltim, PT. Bukit Intan Indoperkasa, PT. Berau Bara Energi, dan PT. Berau Bara Mandiri. Beberapa perusahaan tersebut menguasai lahan sekitar 560.897Ha ([Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, 2018](#)).

Selain itu, berdasarkan laporan Jangka Menengah dan Panjang Daerah (RMPD) Berau, sektor kehutanan dan maraknya pembangunan industri ilegal tambang menjadi penghambat program pembangunan Kab. Berau. Permasalahan ini juga terdapat dalam data *World Resources International* (WRI) Indonesia, dimana Kab. Berau menjadi wilayah dengan penebangan hutan secara ilegal seluas 389Ha untuk pembukaan lahan dan perkebunan menggunakan teknik tebak dan bakar (*slash and burn*)([Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2019](#)). Berikut merupakan gambar lokasi tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Berau.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : aprin.ats@gmail.com.

**Gambar 1 Lokasi Tambang Ilegal Wilayah Kab. Berau**



(Sumber : World Research International – WRI)

Berbagai upaya dilakukan baik rancangan program pemerintah pusat hingga daerah untuk meminimalisir permasalahan hutan tersebut hingga menertibkan kembali sistem patroli pada tingkat wilayah hutan. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya melakukan berbagai kampanye, penyuluhan, dan sosialisasi terkait mitigasi kebakaran dan pelanggaran pemanfaatan hutan. Selain itu, pemerintah kabupaten dan daerah juga merancang regulasi untuk menertibkan beberapa wilayah penambangan ilegal yang berpotensi dilakukannya kegiatan produksi secara berulang, hal ini mengingat bahwa Kalimantan Timur merupakan wilayah produksi tambang ilegal besar di Indonesia. Salah satu upaya besar yang dilakukan juga termasuk dalam pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah hutan. Hal ini merupakan bagian dari program reformasi kehutanan RI tahun 2007. Pembangunan ini juga bertujuan untuk kembali memperkuat monitoring wilayah perhutanan Indonesia secara langsung, menyelesaikan permasalahan hutan secara langsung, dan menambah pendapatan masyarakat sekitar hutan melalui program pemanfaatan hasil hutan melalui program Ekonomi Hijau ([Potret Kehutanan Kalimantan Timur dan Pembangunan Berkelanjutan, 2020](#)).

Program pembangunan ini merupakan program besar yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan RI untuk mewujudkan pelestarian hutan yang membutuhkan beberapa rekan terkait agar program ini dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, beberapa pihak turut serta dalam pengimplementasian program tersebut, salah satunya adalah GIZ (*Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*)- Jerman melalui program FORCLIME (Forest and Climate Change). Keberadaan GIZ di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1975 yang secara khusus bekerja pada program pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, salah satunya Indonesia dengan koordinasi melalui pihak BAPENAS dan beberapa kementerian terkait. Beberapa bantuan tersebut diberikan secara bertahap sesuai keperluan program dan berbentuk hibah yang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Jerman (KfW) hingga program pembangunan ini selesai. Selain itu, bantuan teknis juga diberikan melalui dilakukannya berbagai program penyuluhan, edukasi mitigasi kebakaran hutan, dan pemanfaatan teknologi pemanfaatan hutan. Program ini sendiri berjalan dari tahun 2009 hingga tahun 2014 ([Berau Prokal, Kasus Pembalakan Liar Berau, 2016](#)).

## Kerangka Teori

Dalam menganalisis peran GIZ FORCLIME melalui program pembangunan KPH di Kabupaten Berau menggunakan teori Environmentalisme.

### Environmentalisme

Environmentalisme merupakan salah satu gerakan restorasi lingkungan yang hadir pasca revolusi industri tahun 1970 dengan maraknya kegiatan industrial dan eksploitasi sejumlah pabrik besar batubara yang telah mengakibatkan polusi udara dan pembuangan limbah secara besar-besaran. Gerakan ini muncul sebagai wujud tanggungjawab manusia dalam aksi penyelamatan lingkungan yang juga disebut sebagai *Green Movement* (Yeni Sri Lestari, 2018).

Pada dasarnya environmentalisme didasari oleh kesadaran untuk mengupayakan kesetaraan hubungan antara manusia-lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Timothy O'Riordan konsep Environmentalisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek utama yaitu :

- a. Environmentalisme merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan falsafah alam sekitar
- b. Environmentalisme merupakan konsep yang membahas perjuangan hidup manusia dengan berazaskan alam sekitar sebagai dasar dalam bertindak

Environmentalisme merupakan konsep yang berhubungan dengan perencanaan pengamanan alam sekitar yang merujuk pada pihak berwenang dengan azas alam sekitar agar diterapkan di semua aspek (Apriwan, 2011).

Dalam perkembangannya, terdapat dua pandangan perihal permasalahan lingkungan yaitu Environmentalisme dan Green Politics. Kedua perspektif ini muncul atas keprihatinan yang sama terhadap permasalahan lingkungan. Menurut Matthew Patterson, environmentalisme berfokus pada penyesuaian struktur politik, ekonomi, dan sosial agar selaras dan diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di dunia. Sementara itu, menurut David Mazmanian terdapat beberapa faktor yang mendukung tercapainya program restorasi lingkungan berjalan secara efektif diantaranya:

- a. Terdapat tujuan yang jelas dan konsisten dalam menjalankan program
- b. Dasar teori dan pertimbangan yang kuat saat dilakukannya eksekusi program, sehingga dapat dipastikan kebijakan yang dijalankan memberikan perubahan
- c. Para pelaksana program berkomitmen dan melaksanakan sehingga mencapai tujuan analisis
- d. Terdapat perubahan dalam kondisi sosio-ekonomi yang tidak melemahkan pihak manapun.

Sebaliknya, menurut Lewis A. Gunn terdapat beberapa faktor yang menyebabkan program restorasi lingkungan sulit untuk dieksekusi yaitu :

- a. Keadaan eksternal yang tidak mendukung lembaga pelaksana
- b. Terbatasnya sumberdaya
- c. Kebijakan yang diimplementasikan berdasarkan teori yang valid tentang hubungan sebab-akibat

Minimnya tingkat pemahaman masyarakat sekitar perihal program yang akan diimplementasikan serta kurangnya sosialisasi antar pihak mengenai program yang akandijalankan (Matthew Patterson, 2005).

Oleh karena itu, Environmentalisme sangat menerima keterlibatan dari semua pihak dalam upaya pelestarian lingkungan dan menempatkan lingkungan menjadi unsur prioritas dengan memberikan ruang kepada setiap struktur untuk menyuarakan perubahan pola sosial-politik yang lebih memperhatikan dan memprioritaskan lingkungan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan memberikan gambaran terkait Peran GIZ Jerman dalam membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kab. Berau Tahun 2009-2014. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari proses wawancara dengan pihak terkait dalam objek penelitian yaitu Dinas Kehutanan dan pihak GIZ serta data sekunder yang diperoleh dari beberapa artikel, jurnal, dan akses internet yang berkaitan dengan topic yang dibahas dalam penelitian). Selain itu, Teknik Analisis Data yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan penjelasan lebih detail terhadap suatu informasi tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Serta berisi analisa dari data-data yang berhasil dikutip.

### **Hasil dan Pembahasan**

Permasalahan hutan Kab. Berau menjadi keprihatinan pemerintah daerah hingga pusat. Dinas Kehutanan Kab. Berau mencatat sekitar 150.448 Ha lahan hutan Berau mengalami pengalih-fungsian lahan yang dijadikan sebagai lahan industri hingga kepada aktivitas industri ilegal. Salah satu sektor industrial yang menguasai wilayah hutan Berau yaitu sektor pertambangan dengan luas 7.571Ha. Namun, data tersebut belum termasuk dalam penghitungan luas lahan hutan yang dijadikan sebagai industri ilegal. Permasalahan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan wilayah Berau kedepannya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kalimantan Timur dan Berau dalam rangka meminimalisir permasalahan hutan yang terjadi baik eksternal dan internal. Upaya tersebut diantaranya adalah :

- 1. Kaltim Green**  
Merupakan salah satu program Pemerintah Kalimantan Timur dengan tujuan meminimalisir permasalahan hutan. Hal ini juga dibuktikan dengan komitmen Kaltim sebagai wilayah percontohan untuk Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dengan mendukung penurunan hot spot (titik kebakaran) hutan dibawah 500 titik dengan pengaktualisasian gerakan “One Man, Five Trees” tahun 2010-2013. Pada wilayah Berau, program ini diwujudkan dengan agenda sosialisasi dengan tema “Menggagas Peta Jalan Pembangunan Hijau Berau Melalui Investasi Komoditas Lestari”.
- 2. Program Karbon HUTan Berau (PKHB).**  
Program ini merupakan kegiatan konservasi lingkungan yang bekerjasama dengan The Nature Conservancy (TVC). PKHB bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga public dan masyarakat yang berada di Kab. Berau untuk mendorong dan menguatkan kerangka kerja yang

mendukung strategi pengurangan emisi, dan akuntabilitas tata kelola hutan yang baik (Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, 2019).

Selain beberapa upaya tersebut, pemerintah Berau juga turut dalam pengimplementasian program pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk lebih diperhatikan melalui beberapa program, salah satunya adalah pembangunan KPH pada wilayah Berau. Pembangunan KPH tersebut merupakan bagian daripada reformasi kehutanan tahun 2007 dengan tujuan untuk memperkuat sistem tata kelola

wilayah hutan secara langsung. Selain itu, melalui pembangunan KPH juga dapat menyelidiki berbagai industri tambang dan industri lainnya yang berkembang tanpa adanya izin penggunaan lahan. Tentu hal ini merupakan program besar dengan melibatkan partisipasi dari beberapa pihak dengan pengenalan program hingga pada eksekusi program, salah satunya dengan melibatkan pihak GIZ Jerman.

Partisipasi GIZ Jerman dalam pembangunan KPH di Kab. Berau diawali dengan melakukan observasi secara langsung oleh pihak GIZ Jerman beserta beberapa pihak kementerian dan pemerhati lingkungan lainnya. Bentuk partisipasi yang diberikan adalah melalui bantuan teknis dan finansial. Dalam mengimplementasikan program ini, GIZ bekerjasama dengan Bank Pembangunan Jerman (KfW) (GIZ FORCLIME, 2020). Berikut merupakan bagan kinerja dari GIZ dan KfW dalam upaya pembangunan berkelanjutan pada suatu Negara .

**Gambar 2 Bagan Pembagian Kinerja GIZ dan KfW**



Sumber : <https://www.giz.de/en/aboutgiz/profile.html>

Gambar diatas merupakan spesifikasi kiberja GIZ dan KfW sebagai kedua pihak yang berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Kedua bantuan yang diberikan terdiri atas Bantuan Teknis dan Finansial beserta dengan penjelasannya adalah sebagai berikut.

#### A. Bantuan Teknis

Pada bantuan teknis meliputi berbagai program kerja yang dirancang melalui berbagai pertimbangan setelah dilakukan observasi secara langsung. Dalam program Bantuan Teknis ini terdapat program FORCLIME (*Forest and Climate Change*) yang dibentuk pada tahun 2009 dengan tujuan untuk retorasi lingkungan dan permasalahan lingkungan lainnya. Program FORCLIME juga mengacu pada keputusan Presiden SBY terkait reformasi kehutanan melalui program pengembangan unit pengelolaan hutan (KPH) yang bertujuan untuk mempercepat pengelolaan dan pelestarian hutan. Sebelum dilakukannya eksekusi program, pihak Indonesia dan GIZ FORCLIME membentuk forum IFCA (Indonesia Forest Climate Alliance) sebagai forum konsultasi

antara pemerhati lingkungan untuk menganalisis status kesiapan Indonesia dalam proyek pembangunan KPH ([Forest and Climate Change, 2015](#)).

**Gambar 3 Kunjungan GIZ FORCLIME dan KLHK dalam Perhutanan Sosial**



Program penting yang dilakukan dalam bantuan teknis ini sendiri adalah dengan pembangunan DA (*Demonstration Activities*) – REDD+ pada masing-masing kabupaten terpilih dengan minimal target penurunan emisi sebesar 300-400.000 CO<sub>2</sub> selama 7 tahun yang diimplementasikan pada tiga wilayah yaitu Berau, Malinau, dan Kapuas Hulu. Dalam upaya tersebut termuat dalam modul kerjasama teknis yang terbagi atas tiga komponen diantaranya :

**1. Saran kebijakan, Pengembangan Strategi dan Pengembangan Kelembagaan.**

Dalam hal ini pihak GIZ memberikan saran-kebijakan dalam hal perbaikan kebijakan terkait pengelolaan hutan lestari pada tingkat nasional dan daerah. Dalam pelaksanaannya, strategi ini lebih mengarah kepada perencanaan kehutanan dan tata kelola.

**2. Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)**

GIZ mendukung pemerintah provinsi hingga kabupaten dalam melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan restorasi lingkungan. Penyuluhan ini dilakukan oleh tim KPHP Berau bersama dengan The Borneo Inisiatif Conservancy (TNC) dengan melakukan kunjungan ke beberapa wilayah hutan serifikasi hutan lestari. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kasus pembalakan liar hingga tenurial.

**3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

GIZ FORCLIME menyediakan dukungan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia pada tingkat nasional-kabupaten untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Hal ini juga dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengurangan emisi GRK dari sektor kehutanan. Pendampingan ini diarahkan kepada penguatan kapasitas manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pelatihan terkait dengan KPH, mitigasi perubahan iklim.

**4. Pengelolaan Terpadu Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Daerah**

FORCLIME menyediakan pendampingan terkait dengan sistem pengelolaan terpadu dengan fokus pada implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pendampingan ini dilakukan oleh FORCLIME yang termuat dalam kerangka pengelolaan cagar biosfer

untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati ([Forest and Climate Change - GIZ, 2015](#)).

Sementara itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tata kelola hutan, GIZ FORCLIME menerapkan beberapa program yang termuat dalam program pembangunan KPH di Berau diantaranya :

1. Melakukan perencanaan tata guna lahan dan penetapan kawasan hutan. Pada kegiatan ini berpusat pada dua aktivitas yaitu tata batas administrasi desa dan tata batas administrasi tata guna lahan. Kegiatan ini mengarah kepada UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 45 Tahun 2016 terkait tata batas desa. Pada wilayah Berau, GIZ memfasilitasi tata batas wilayah antara wilayah Segah-Kelay dan melakukan survey pengelolaan hutan.
2. Melakukan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat.  
Kegiatan patroli ini dilakukan pada 14 hutan desa dengan realisasi area patroli sekitar 2.089Ha. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pengamanan ekosistem hutan dari potensi deforestasi dan degradasi hutan serta melindungi keanekaragaman hayati di dalamnya.

### 3. Memfasilitasi Program Perhutanan Sosial

Program perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan pada kawasan hutan negara oleh masyarakat sekitar area hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Pembangunan ini tentu sangat terbagi atas masyarakat dalam satu kelompok usaha perhutanan sosial yang terbagi atas 21 KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) melalui kegiatan training dan studi banding. Melalui kegiatan ini juga memperoleh manfaat ekonomis melalui berbagai usaha, salah satunya adalah usaha pengelolaan madu hutan ([Dana Reboisasi Hutan Kalimantan Timur, 2020](#)).

## B. Bantuan Finansial (Financial Cooperation – FC)

Bantuan finansial secara resmi dimulai dengan terselenggaranya pertemuan antara Staf Ahli Menteri, I Made Subadia Gelgel dan Angela Merkel tahun 2011. Dalam pertemuan bilateral ini, Jerman menyerahkan modul FC dengan total bantuan senilai 27 juta euro (dalam bentuk hibah). Pendanaan ini diberikan dalam jangka waktu 7 tahun proses kerja dengan tiga tahap pencairan yaitu bulan 1-6, bulan 7-24, dan tahun 3-7 ([Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016](#)).

Bantuan finansial ini diberikan untuk melaksanakan mandat dalam perwujudan strategi perbaikan kondisi kehidupan masyarakat sekitar hutan. Dalam modul bantuan finansial ini juga terdapat tiga komponen yaitu pembentukan National Project Management Unit (NPMU), pembentukan District Project Management Unit (DPMU), dan Demonstration Activities (DA) ([FC- Forest and Climate Change, 2015](#)).

Dalam program pembangunan KPH di Berau menghasilkan beberapa pencapaian yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan, yaitu :

1. Penyelesaian konflik tenurial KPH Berau (9 September 2014)  
Konflik ini diawali dengan permasalahan wilayah yang terjadi pada lahan di PT, Inhutani Labanan Satuan dengan masyarakat sekitar. KPH Berau bersama Working Group on Forest Land Tenure dengan melakukan mediasi penyelesaian konflik dengan menghasilkan beberapa poin kesepakatan untuk menghentikan program ini.

2. Penyelesaian Kasus Tambang Ilegal di Berau, Kalimantan Timur Pembangunan KPH Produksi di wilayah Berau merupakan hal penting yang bertujuan untuk menertibkan beberapa tambang ilegal tanpa adanya izin usaha dan izin pemanfaatan lahan. Hingga akhir tahun 2019, KPH bersama dengan Dinas Kehutanan, Dinas Sumberdaya Mineral dan KPH telah menertibkan 5 usaha tambang dan melakukan reklamasi terhadap 11 lubang tambang yang berada di sekitar area pemukiman warga.

Berdasarkan bantuan teknis dan dana yang diberikan oleh Jerman dalam pembangunan unit KPH di Berau, dapat disimpulkan bahwa Jerman memiliki perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan melalui beberapa program restorasi lingkungan dan bantuan dana di beberapa negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Hal ini juga terbukti dengan beberapa program kerja GIZ Jerman terkait penertiban lahan bermasalah, peningkatan sumberdaya manusia pengelola hutan, serta melakukan sosialisasi mitigasi bencana kebakaran hutan. Beberapa program tersebut terdapat dalam IA (Implementing Agreement) yang ditandatangani oleh pelaksana program yaitu Pemerintah Jerman dan Indonesia.

Namun, dalam proses eksekusi program tersebut terdapat beberapa hambatan diantaranya:

1. Jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia yang terbatas
2. Minimnya data informasi wilayah perhutanan,
3. Alat-alat operasional kerja yang kurang memadai, dan
4. Manajemen kepemimpinan KPH yang kerap berubah (Departemen Kehutanan – FC, 2016).

Sementara itu, faktor eksternal yang mengakibatkan lambatnya pembangunan KPH adalah distribusi dana anggaran kinerja dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta minimnya dukungan swasta. Program bantuan yang diberikan oleh Jerman merupakan bagian dari tanggungjawab Jerman sebagai negara maju untuk membantu pembangunan berkelanjutan di negara berkembang melalui upaya perhentian industri ilegal yang berdampak negatif di masa mendatang. Melalui pencapaian target emisi tersebut, Jerman juga menggunakan alternative CDM (*Clean Development Mechanism*) yang merupakan salah satu mekanisme penurunan emisi yang berfokus pada penuntasan permasalahan kebakaran hutan (Hilvan Saputra, 2017).

Melalui program tersebut Jerman tidak perlu mengorbankan industrinya dan tetap bisa melakukan kegiatan produksi. Bantuan yang diberikan oleh Jerman kepada Indonesia adalah bentuk ketergantungan Jerman yang masih membutuhkan bahan mentah yang dihasilkan oleh hutan Indonesia sebagai bahan industri pabrik yang dimiliki oleh Jerman. Peran Jerman dalam membantu menuntaskan permasalahan lingkungan di Indonesia dapat dianalisis melalui pandangan environmentalist perihal pencemaran lingkungan, ancaman kepunahan satwa, ancaman perubahan iklim yang berdampak pada masa mendatang.

Dalam merealisasikan program pelestariannya, Environmentalisme sangat menerima penana dari berbagai struktur untuk menangani permasalahan lingkungan yang terjadi. Pendekatan yang dilakukan adalah liberal institusional dengan melibatkan setiap institusi nasional dan internasional agar dapat memberikan solusi terkait

permasalahan lingkungan yang terjadi. Environmentalisme juga hadir untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia-lingkungan dengan prioritas alam sekitar. Hubungan bilateral Jerman-Indonesia memberikan dampak positif dimana Jerman turut dalam pelestarian hutan dan pembangunan KPH di Indonesia wilayah Berau. Melalui keterlibatan ini, Jerman memberikan bantuan teknologi dan finansial yang dapat mendukung terlaksananya program dengan melakukan berbagai penyuluhan dan keterbukaan terhadap pihak manapun. Partisipasi dari pihak luar merupakan salah satu hal yang menunjang keberhasilan suatu program. Dalam program ini terdapat bantuan dari pihak BMZ dan KfW serta berbagai pihak penyelamat lingkungan lainnya melalui berbagai program bantuan (Jill Steans and Lloyd Pettiford, 2009, Hal. 378).

Program pembangunan KPH oleh GIZ FORCLIME juga merupakan program berjangka panjang dengan tujuan yang jelas untuk memperkuat sistem tata kelola perhutanan secara langsung. Hal ini berkenaan dengan faktor keberhasilan suatu program restorasi lingkungan untuk dijalankan menurut David Mazmanian, dimana keberhasilan program tergantung pada tujuan yang jelas dari program tersebut dan memiliki jangkauan waktu yang panjang. Durasi kinerja selama 5 tahun dalam pembangunan KPH di Berau merupakan jangka waktu yang lama untuk diterapkan padasatu wilayah Berau. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu panjang terkait dengan pembahasan teknik impllementasi program, sosialisasi program yang dilakukan kepada masyarakat, melakukan evaluasi dan investigasi secara langsung pada tingkat wilayah hutan, serta penguatan kelembagaan. Selain dengan penguatan kelembagaan, tentu membutuhkan dana yang besar untuk pengimplementasian program.

Sementara itu, menurut Eder kinerja Environmentalisme juga harus dilakukan melalui pendekatan ekologi dan ekonomi yang menguntungkan masyarakat sekitar area kawasan hutan. Hal ini akan membantu masyarakat untuk lebih paha embgenai program yang dijalankan. Sesuai dengan perspektif tersebut, GIZ Jerman melalui program FORCLIME melakukan sosialisasi ekonomi hijau yang merupakan salah satu program denganazas lingkungan dan pembangunana berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

Berdasarkan jumlah unit KPH yang berhasil dibangun yaitu sekitar 34 unit, dapat disimpulkan bahwa Jerman sangat serius dalam menjalankan program ini. Peranan GIZ FORCLIME sangat sesuai dengan prinsip Environmentalisme dengan membuka kesempatan bagi pihak manapun untuk berpartisipasi serta melakukan berbagai penyuluhan yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan hutan di Kab. Berau dengan beberapa pencapaian diantaranya :

1. Pembangunan unit KPH Berau yang berada di beberapa titik wilayah perhutanan seperti Kelay, Segah, Sambaliung, dan Teluk Bayur
2. Melakukan kerjasama kemitraan dengan Perusahaan PT. Inhutani I Labanan untuk turut serta dalam pengelolaan hutan yang membantu sistem tata kelola
3. Membantu pemerintah dan aparat hulum untuk menindak kasus penambangan ilegal yang menghasilkan 11 perusahaan tambang ilegal berhasil ditertibkan dan menutup izin pnrindustrian.
4. Melalui kegiatan usaha agroforestry memperoleh pendapatan Rp. 20.157.250.070,- yang diselenggarakan di budidaya keratom, sylvofishery memperoleh pendapatan Rp. 2.790.302.000, serta

- pengolahan madu berbahan baku madu hutan dengan penghasilan Rp. 2.260.748.000,- dan pendapatan produksi madu kelulut Rp. 86.001.600,- (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 2018).
5. Penerapan Land Use Planning yang bertujuan pada penentuan tata batas administrasi desa dan tata guna lahan. Hal ini mengarah pada UU Desa Tahun 2014 dan Permendagri No. 45 Tahun 2016 perihal batas wilayah hutan dan kepemilikan desa. Dalam program ini menghasilkan 13 kampung mendapatkan keputusan batas wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah
  6. Melakukan sistem Patroli Hutan : pembangunan KPH GIZ bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Berau juga menerapkan sistem patrol hutan yang dilaksanakan pada 14 hutan desa dengan realisasi patrol sekitar 2.089 yang bertujuan untuk melindungi danantisipasi defrestasi dan degradasi hutan.
  7. Fasilitas Program Perhutanan Sosial : Dalam pembangunan KPH, GIZ dan Dinas Kabupaten Berau menerapkan sistem perhutanan sosial yang bertujuan untuk mengelola hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara dan hutan adat. Tentu, dalam program ini juga terbentuk beberapa kelompok yang beranggotakan masyarakat sekitar dengan bekerja sesuai program rencan hutan desa dan juga terdapat training dan studi banding yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan hutan (Laporan Kegiatan FORCLIME, 2020).

Pencapaian yang lainnya adalah masyarakat dapat membudidayakan dan juga memanfaatkan hasil dari pengelolaan hutan mereka melalui program Ekonomi Hijau melalui pemanfaatan hasil madu.

### **Kesimpulan**

Dengan terbangunnya unit KPH di Kab. Berau memberikan hal positif dari kedua belah pihak negara, terutama bagi Indonesia dalam pengetahuan sistem tata kelola hutan dan kembali memberdayakan KPH sebagai lembaga pengelolaan hutan yang juga beroperasi pada tingkat lapangan. Selain itu, pembangunan KPH pada wilayah Berau juga bertujuan untuk mengurangi resiko kebakaran hutan yang terjadi, dimana Berau merupakan wilayah dengan keberadaan hutan gambut yang besar dan memungkinkan untuk terjadinya kebkaran.

Melalui bantuan yang diberikan oleh GIZ Jerman dalam bentuk teknis dan finansial juga dapat membantu reformasi sistem pengelolaan hutan dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat sekitar melalui berbagai penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan mitigasi bencana dan penanggulangan kebakaran hutan. Pembangunan KPH juga dirangkai dengan sosialisasi mitigasi permasalahan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan pelatihan pengelola KPH serta pembangunan unitnya dengan wilayah Berau yang memiliki wilayah gambut cukup besar. Melalui program ini, masyarakat sekitar area hutan juga dibina untuk mendapatkan penghasilan sebagai upaya dari pemanfaatan hasil hutan yang menguntungkan bagi warga sekitar melalui beberapa program seperti Program Ekonomi Hijau yang memberikan manfaat finansial bagi warga yaitu melalui kegiatan usaha, Penerapan Land Use Planning yang bertujuan pada penentuan tata batas administrasi desa dan tata guna lahan, Melakukan sistem Patroli Hutan yang dilaksanakan pada 14 hutan desa dengan realisasi patrol sekitar 2.089 yang bertujuan untuk melindungi danantisipasi defrestasi dan degradasi

hutan, Fasilitas Program Perhutanan Sosial dengan menerapkan sistem perhutanan sosial yang bertujuan untuk mengelola hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negaradan hutan adat.

### Daftar Pustaka

- Apriwan, 2011 The Politics of Global Environment,  
[http://repository.unand.ac.id/17653/1/Vol.02\\_No.01\\_2011.pdf](http://repository.unand.ac.id/17653/1/Vol.02_No.01_2011.pdf), diakses pada 12 Januari 2020
- Deforestasi dan Degradasi Hutan Kalimantan Timur, didapat melalui <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/redd/implementasi/327-focus-group-discussion-identifikasi-penyebab-deforestasi-dan-degradasi-hutan-serta-aktivitas-yang-menyebabkan-pengurangan-emisi-peningkatan-serapan-dan-stabilisasi-stok-karbon-hutan-di-provinsi-kalimantan-timur>, diakses pada 24 Januari 2020
- Departemen Kehutanan, FC Module Memulai Kegiatan Dilapangan”. Didapat melalui [http://www.dephut.go.id/files/ForclimeWorkshop\\_290711.pdf](http://www.dephut.go.id/files/ForclimeWorkshop_290711.pdf), diakses pada 13 Februari 2020
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – FORCLIME. 2012. Tantangan: Mengembangkan Perekonomian yang berkesinambungan dengan alam.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, *Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Provinsi Kalimantan Timur 2011-2030*.
- FORCLIME, Jerman Dukung Program Forclime, lihat <http://www.forclime.org/index.php/in/news/8-news/76-german-government-supports-forestsand-climate-change-programe>, diakses pada 9 Januari 2022
- FORCLIME, Progres Activity 2013 Forest Programme Financing Cooperation Module (FORCLIME FC)
- Hilvan Saputra. Program Jerman Dalam Penuntasan Masalah Kerusakan Hutan di Indonesia. Vol. 4 No. 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Didapat melalui <https://media.neliti.com/mediaPDFPROGRAMFORCLIMEJERMAN>, diakses pada 9 Januari 2021
- Industrialisasi Hutan dan Dampaknya, didapat melalui <https://media.neliti.com/media/publications/478-ID-industrialisasi-kehutanan-dan-dampaknya-terhadap-masyarakat-adat-kasus-kalimanta.pdf>, diakses pada 10 Januari 2022
- Jill Steans and Lloyd Pettiford, Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009)
- Kirsfianti, Mega, dkk, 2005. Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Vol. 2 No. 2 Juli Tahun
- Laporan Kegiatan dan Program FORCLIME. Didapat melalui <https://www.forclime.org/index.php/id/tentang-tc>, diakses pada 29 Februari 2021

Matthew Patterson dalam Scott Burchill.et.al., *Theories of International Relations: Third Edition* (New York: Palgrave Macmillan. 2005) , 236

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan Periode 2003-2009, didapat melalui [https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2013/02/PHKI\\_2000-2009\\_FWI\\_low-res.pdf](https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2013/02/PHKI_2000-2009_FWI_low-res.pdf)

Pengelolaan Sistem Perhutanan Indonesia. Didapat melalui <https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1653455684.pdf>, diakses pada tanggal 29 April 2022

Realisasi Kaltim Green, didapat melalui <https://prokom.kukarkab.go.id/berita/pemerintahan/program-kaltim-green-demi-meningkatkan-kualitas-sdm>, diakses pada tanggal 9 November 2022

Roby Harianto. Peran Norwegia Terhadap Deforestasi di Indonesia dalam Skema Reducing Emission From Deforestation and Degradation (REDD+) Tahun 2014-2016. Tersedia dalam Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Sejarah GIZ di Indonesia, didapat melalui <https://www.giz.de/en/worldwide/23079.html>, diakses pada tanggal 20 April 2021

Tommy Joko P, Sukma Sushanti, Putu Titah K, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Udayana, 2019, Kepentingan Jerman dalam Penanganan Deforestasi di Kalimantan (2010-2016).

Yeni Sri Lestari. 2018. *Environmentalism dan Green Politics : Pembahasan Teoritis*.

Hal. 190